

Realisasi keuangan dana perimbangan regional di Indonesia

Abdi Tanjung ¹ Hefrizal Handra ² Efa Yonnedi ³

¹ Institut Pendidikan Tapanuli Selatan,

^{2,3} Universitas Andalas

E-mail korespondensi: *abditanjung.1992@gmail.com*

Abstract

Theory federalism preservation market emphasize importance decentralization and incentive government on development market. This article explores the definition of financial realization of balancing funds embedded in the vision compete for regional finance in Indonesia. its activities are oriented towards the free market in Indonesia imagine expansion framework regulation in whole cleavage earth, promises better financial services, credit and investment in the country in exchange for strong financial property protection and (implicitly) by dramatic reduce autonomy policy finance for government area. The central government will certainly promote strict state management of foreign and domestic investors, populist redistribution, and increasing dependence on non-financial transactions market. Indonesia's regional finance project will unite regions through regional physical infrastructure and capitalist financial markets while maintaining the a public sector bank that is responsive to central government priorities. Approach in every area will emphasize on needs government for authority financial policy and with this approach attention to predictability regulation and deepening finances will be better in the future. Equality is usually not a term associated with competing designs for finance. But the understanding that contrast about what is needed to improve the set of rules that govern saving savings and provision credit almost always involve conceptualization implicit or explicit about equality and justice.

Keywords: *financial realization, balancing fund*

Abstrak

Teori federalisme pelestarian pasar menekankan pentingnya desentralisasi dan insentif pemerintah pada pengembangan pasar. Artikel ini mengeksplorasi definisi realisasi keuangan dana perimbangan yang tertanam dalam visi bersaing untuk keuangan regional di Indonesia. kegiatannya berorientasi pada pasar bebas di Indonesia membayangkan perluasan kerangka peraturan di seluruh belahan bumi, menjanjikan layanan keuangan, kredit, dan investasi yang lebih baik di negara ini sebagai imbalan atas perlindungan properti keuangan yang kuat dan (secara implisit) secara dramatis mengurangi otonomi kebijakan keuangan bagi pemerintah daerah. Pemerintah pusat tentu akan mempromosikan manajemen negara yang tegas dari investor asing dan domestik, redistribusi populis, dan meningkatkan ketergantungan pada transaksi keuangan non-pasar. Proyek keuangan regional indonesia akan menyatukan daerah melalui infrastruktur fisik daerah dan pasar keuangan kapitalis sambil mempertahankan peran bank sektor publik yang responsif terhadap prioritas pemerintah pusat. Pendekatan di setiap daerah akan menekankan pada kebutuhan pemerintah untuk otoritas kebijakan keuangan dan dengan pendekatan ini perhatian untuk prediktabilitas peraturan dan pendalaman keuangan akan semakin baik nantinya. Kesetaraan biasanya bukan istilah yang terkait dengan desain yang bersaing untuk keuangan. Namun pemahaman yang kontras tentang apa yang dibutuhkan untuk meningkatkan seperangkat aturan yang mengatur pengamanan tabungan dan penyediaan kredit hampir selalu melibatkan konseptualisasi implisit atau eksplisit tentang kesetaraan dan keadilan.

Kata kunci : Realisasi Keuangan, Dana Perimbanga

PENDAHUUAN

Konseptualisasi Realisasi muncul dengan beberapa keteraturan dalam diskusi tentang regulasi keuangan. Ide-ide ini (lebih tepat, kumpulan ide-ide terkait, tapi saya lebih suka tata nama yang lebih sederhana) tidak terutama dihasilkan dari pengamatan empiris langsung tentang hubungan sebab dan akibat, melainkan mewakili asumsi atau keyakinan kausal, seringkali dengan nuansa moral yang kuat, tertanam dalam budaya tertentu, intelektual, atau tradisi politik. Ide pertama yang memberikan pengaruh adalah perlakuan yang sama di bawah hukum untuk semua investor atau pemberi kredit. Konsep perlakuan yang sama dalam hubungan komersial berasal dari gagasan yang dipegang teguh tentang keadilan yang menonjol di Amerik, Inggris, dan sebagian besar Eropa Barat, yang menunjukkan bahwa hanya dalam ekonomi yang terbelakang dan kurang berkembang, wirausahawan akan lebih suka berbisnis dengan pelanggan dan pemasok yang memiliki etnis atau latar belakang yang sama.

Dalam ekonomi modern, sebaliknya, warna uang sama untuk semua pemegangnya, dan transaksi bisnis seharusnya tidak diskriminatif. Tema ini menonjol, misalnya, dalam tulisan-tulisan Adam Smith (Smith dan Sutherland 2008 1776). Memperluas logika ini, kerangka hukum yang dengan cara apa pun mendiskriminasikan perusahaan nasional, berbeda dengan asing, dipahami sebagai melestarikan ide-ide lama dan tidak sah. Selain itu, pembangunan keuangan nasional memerlukan pembentukan hak milik yang aman dalam aset keuangan maupun fisik (de Soto 1989; Bank Dunia 1989; BIS 2008). Nilai perlakuan yang sama bagi investor negara asal dan investor asing sangat erat kaitannya dalam benak penganut konsep bahwa pemegang saham minoritas dalam suatu perusahaan harus mendapatkan hak yang sama (misalnya, untuk memberikan suara dalam rapat pemegang saham atau untuk mengakses hak yang sama. menawarkan sebagai pemegang saham besar) sebagai individu dengan kepentingan pengendali di perusahaan.

Singkatnya, gagasan penting pertama tentang kesetaraan berkaitan dengan akses bank, kreditur, dan investor lain ke pasar, dan dengan perlindungan hukum dan peraturan bagi pemilik aset keuangan, baik kecil (penabung rumah tangga, pemegang saham minoritas) dan besar (investor institusional). Konseptualisasi kedua adalah akses yang sama ke keuangan bagi peminjam, dalam dua versi. Versi pertama, lebih cocok bagi mereka yang secara keseluruhan filosofi ekonominya konservatif (neoliberal), mengidentifikasi dinamika yang mendasari kapitalisme pasar sebagai yang muncul dari persaingan di antara para pengusaha dengan ide-ide yang berpotensi menguntungkan, yang mungkin perlu mereka pinjam. Oleh karena itu, keharusan moral bagi masyarakat yang adil adalah menyediakan keuangan yang melimpah bagi peminjam bisnis swasta yang solid.

Perusahaan keuangan juga harus bersaing satu sama lain. Kebalikan dari pemerataan akses bagi sektor swasta adalah represi keuangan oleh negara. Represi keuangan berarti bahwa pemerintah mengumpulkan sebagian besar tabungan warga negara, baik melalui kontribusi wajib, seperti dana jaminan sosial, atau melalui opsi tabungan sukarela, seperti dalam deposito di bank tabungan pos. Massa simpanan masyarakat. kemudian dialokasikan untuk proyek-proyek yang dipilih oleh perencana pemerintah sesuai keinginan, dalam kasus terburuk untuk dipinjamkan kepada pejabat

publik yang korup, tetapi lebih khusus untuk membangun infrastruktur atau menciptakan juara industri nasional. Either way, pembiayaan yang dipimpin negara didistribusikan secara tidak tepat dengan alasan non-pasar. Akses yang sama akan ditingkatkan dengan memprivatisasi bank-bank pemerintah dan membuka izin-izin perbankan baru bagi bank-bank swasta, termasuk bank-bank asing (La Porta et al. 2002; Caprio et al. 2005). Tema lain dalam konsep kesetaraan akses bagi peminjam bisnis swasta ini adalah perluasan bursa saham dan pasar modal swasta terdesentralisasi lainnya.

Sebaliknya, varian kedua dari akses yang sama condong ke kiri. Ini berfokus pada kegagalan pasar, yang didefinisikan sebagai ketidakmampuan atau keengganan pelaku keuangan swasta untuk memasok sumber daya keuangan dengan harga terjangkau untuk mendanai investasi yang diinginkan secara sosial, seperti proyek infrastruktur besar dengan jangka waktu beberapa tahun sebelum pinjaman dapat dilunasi atau investasi ekuitas menjadi menguntungkan. Tentu saja, definisi kredit dengan harga yang wajar dan investasi yang diinginkan secara sosial harus melibatkan penilaian: tidak ada biaya kredit yang obyektif di atas yang harganya dievaluasi secara universal sebagai tidak masuk akal. Namun demikian, argumen penting yang mendukung peran penting bank sektor publik dan alokasi kredit non-pasar (yaitu, mendukung peningkatan penindasan keuangan untuk meningkatkan akses yang setara) dalam ekonomi kapitalis umumnya adalah bahwa sebagian dari pasar terjebak pada keseimbangan sosial yang tidak diinginkan dan membutuhkan bantuan negara untuk keluar dari perangkap ini (Gershenkron 1962; Stiglitz dan Weiss 1981; Amsden 1992; Allen dan Gale 2000; Von Mettenheim 2012). Di sini penerima implisit dari akses yang sama adalah warga negara, tidak harus sebagai peminjam langsung tetapi sebagai penerima manfaat dari investasi yang diamanatkan publik dan diperlukan secara sosial. Versi akses yang sama ini melegitimasi bank-bank pemerintah. Bank umum juga dapat diminta untuk membuat distribusi kredit dan jasa keuangan lebih merata di antara kelas pendapatan dan kelompok sosial dengan memberikan preferensi kepada peminjam atau kegiatan yang kurang terlayani.

Tema besar ketiga adalah ruang kebijakan yang setara bagi pemerintah yang berdaulat (Gallagher 2005; Chang 2002, 2003). Pendukung menolak asumsi ekonomi neoklasik bahwa hubungan keuangan internasional terjadi di pasar bebas impersonal, di mana pembeli dan penjual mendiskriminasi hanya berdasarkan perbedaan harga atau kualitas, daripada karakteristik ekonomi yang tidak relevan, seperti etnis, afiliasi politik, atau ikatan budaya. Mereka yang mengkonseptualisasikan kesetaraan keuangan pada prinsipnya dalam hal memungkinkan otonomi kebijakan nasional malah menekankan keuntungan besar yang dimiliki oleh negara-negara demokrasi industri maju, dibandingkan dengan ekonomi berkembang, dalam mengendalikan nasib keuangan mereka. Yang pertama menikmati mata uang keras, representasi superior di lembaga keuangan internasional dan tata kelola global, dan otoritas pengatur negara asal atas bank dan investor swasta terbesar di dunia semuanya secara berbeda memberi hak istimewa kepada investor dan peminjam negara maju. Kekuatan yang muncul dapat dan harus menyamakan kedudukan dengan mempromosikan instrumen

keuangan negara tingkat nasional atau regional, seperti bank publik, kontrol modal dan investasi, dan kerjasama keuangan multilateral.

Teori alternatif proyek daera di Indonesia

Indonesia sekarang beralih pada ide-ide yang relevan dengan kebijakan hubungan internasional. Artikel ini menggunakan konsep negara pemimpin, proyek politik-ekonomi internasional, dan kawasan internasional (Armijo dan Rhodes 2013). Calon pemimpin negara adalah, pertama, negara yang relatif mampu dalam sistem antarnegara tertentu yang mungkin global, regional, atau subregional. Dalam sistem antarnegara bagian yang relevan, hal yang masuk akal negara pemimpin setidaknya merupakan kekuatan utama dalam hal posisinya dalam distribusi sistemik kemampuan material (Waltz 1979). Kedua, negara pemimpin harus menunjukkan keinginan untuk memulai, mempertahankan, atau mengubah kerja sama multilateral, terlepas dari biaya yang harus dikeluarkan sumber daya hard dan soft power yang langka, seperti waktu, uang, keahlian, dan reputasi.

Sebagian besar negara calon pemimpin, dan bisa dibilang semua negara yang sukses, mengejar proyek politik-ekonomi antar negara, serangkaian ide yang terkait secara longgar (sebuah model) tentang bagaimana jaringan hubungan ekonomi, sosial, dan politik internasional idealnya harus melihat. Proyek internasional mungkin eksplisit dan agresif, karena dengan *Lebensraum* Nazi Jerman atau eksplisit dan kooperatif, seperti halnya dengan banyak Ger Barat yang mempromosikan Komunitas Ekonomi Eropa. Namun internasional proyek juga mungkin implisit dan jarang dinyatakan, hanya diketahui dengan akumulasi dan tenor pilihan kebijakan suatu negara terhadap tetangganya. Cukup sering, sebuah negara proyek internasional akan berusaha untuk meniru politik, ekonomi, dan nilai budaya di luar negeri.

Konsep-konsep ini konsisten dengan pendekatan realis neoklasik, sarjana yang memahami peluang dan kendala sistemik (seperti yang diberikan oleh distribusi kemampuan material di antara negara-negara berdaulat) sebagai pengaruh dominan pada pilihan kebijakan luar negeri, namun juga mengakui peran preferensi domestik sebagai bentuk oleh minat, institusi, persepsi, dan ide (Rose 1998; Kitchen 2010). Bersih preferensi domestik mempengaruhi pemimpin politik senior incumbent suatu negara (chief eksekutif), yang pada akhirnya menyetujui atau memikul tanggung jawab atas semua keputusan kebijakan luar negeri yang bersifat konsekuensial. Para pemimpin nasional terlibat dalam dua tingkat permainan (Putnam 1988), responsif di satu sisi terhadap tuntutan konstituen dan di yang lain untuk insentif yang dibuat di luar negeri.

Sistem antarnegara itu sendiri sekaligus didasarkan pada realitas objektif dan sebagian ditentukan oleh persepsi. Hal ini terutama berlaku pada tingkat subsistemik wilayah atau subwilayah. Wilayah adalah sekelompok negara bagian, biasanya tetapi tidak selalu secara geografis bersebelahan, di mana para pemimpin nasional dan beberapa proporsi nontrivial dari warga datang untuk melihat diri mereka sendiri secara kolektif, setidaknya untuk beberapa tujuan identitas dan mungkin untuk pembuatan kebijakan publik. Oleh karena itu, ruang lingkup wilayah pada akhirnya

terletak pada pemahaman intersubjektif serta demarkasi objektif (Fawcett dan Hurrell 1995; Acharya 2007; Gomez-Mera 2008). Dalam kedua negara bagian global sistem dan wilayah (atau subwilayah), preferensi kebijakan luar negeri dan tindakan negara-negara yang relatif besar dan kuat lebih penting daripada negara-negara kecil dan lemah.

Kuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Pemerintah adalah pemerintah pusat dan pemerintah daerah, Perusahaan Negara adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh Pemerintah Pusat. Perusahaan Daerah adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, selanjutnya disebut APBN, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disebut APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Penerimaan negara adalah uang yang masuk ke kas negara. Pengeluaran negara adalah uang yang keluar dari kas negara. Penerimaan daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah. Pengeluaran daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah. Pendapatan negara adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Belanja negara adalah kewajiban pemerintah pusat yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Belanja daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya (UU Republik Indonesia No. 17 Tahun 2003 Pasal 1)



Grafik 1. Belanja dan pendapatan pemerintah pusat dan daerah

Sumber: <https://djpb.kemenkeu.go.id/portal/id/data-publikasi-3/publikasi-cetak/3494 kfr-per-provinsi-tahun-2018.htm>

Berdasarkan UU diatas Realisasi Keuangan Regional dan Negara sudah jelas diatur, dibuat dan di sahkan oleh presiden,wakil presiden Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Berikut grafik Realisasi Keuangan Daerah dan Pusat di Indonesia pada Grafik 1.

Tabel 1. Realisasi dana perimbangan dari pendapatan pemeritah Provinsi di seluruh Indonesia

No.	Provinsi	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Aceh	3 735 791 722	4 279 088 345	4 260 348 704	3 873 329 990
2.	Sumatera Utara	7 055 134 430	7 300 647 588	7 347 748 112	7 434 780 086
3.	Sumatera Barat	3 930 814 211	4 027 349 116	4 002 468 880	4 153 832 130
4.	Riau	4 827 923 285	5 136 706 028	5 266 154 198	4 951 196 823
5.	Jambi	2 745 221 968	2 896 753 807	2 849 121 393	2 785 847 932
6.	Sumatera Selatan	5 513 017 500	5 698 701 180	5 835 674 693	5 790 752 683
7.	Bengkulu	1 478 045 279	1 529 114 584	1 427 539 423	2 093 680 877
8.	Lampung	2 816 327 378	2 627 195 349	2 461 886 210	4 195 654 127
9.	Bangka Belitung	1 694 218 759	1 742 433 564	1 604 813 796	1 667 872 218
10.	Kepulauan Riau	2 278 002 977	2 573 155 269	2 282 355 380	2 303 575 846
11.	DKI Jakarta	17 855 177 073	14 494 393 043	16 897 722 314	16 873 544 790
12.	Jawa Barat	14 208 000 404	14 715 372 047	15 881 415 189	16 293 819 865
13.	Jawa Tengah	10 933 776 832	11 334 903 061	11 632 787 042	11 652 358 407
14.	D I Yogyakarta	2 317 436 811	2 385 702 912	2 371 044 354	2 471 981 741
15.	Jawa Timur	13 295 784 850	13 941 687 210	13 477 579 299	14 706 225 557
16.	Banten	3 978 289 426	4 166 561 802	4 375 121 803	4 335 236 832
17.	Bali	2 493 979 973	2 548 063 873	2 564 355 199	2 815 549 490
18.	Nusa Tenggara Barat	3 212 386 690	3 342 865 637	3 359 548 334	3 394 625 397
19.	Nusa Tenggara Timur	3 680 327 636	4 067 952 845	4 152 039 227	4 174 688 835
20.	Kalimantan Barat	3 444 983 950	3 620 122 786	3 506 829 942	3 794 115 932
21.	Kalimantan Tengah	2 907 967 886	3 173 404 284	3 103 450 065	3 046 422 367
22.	Kalimantan Selatan	2 986 689 752	3 145 120 774	3 398 763 336	1 783 725 577
23.	Kalimantan Timur	4 829 780 659	5 176 264 299	4 759 527 447	4 180 730 432
24.	Kalimantan Utara	1 825 311 428	1 953 289 844	1 799 125 383	1 462 022 554
25.	Sulawesi Utara	2 505 226 773	2 605 769 430	2 519 010 935	2 585 484 063
26.	Sulawesi Tengah	2 731 430 164	2 994 301 818	3 030 626 794	2 977 493 422
27.	Sulawesi Selatan	5 287 519 278	5 388 320 705	5 395 232 629	5 664 328 853
28.	Sulawesi Tenggara	2 865 113 577	2 947 699 275	2 871 712 574	2 960 493 409
29.	Gorontalo	1 398 182 155	1 495 154 618	1 409 195 377	1 465 550 080
30.	Sulawesi Barat	1 497 510 143	1 688 130 947	1 646 819 607	1 642 932 141
31.	M a l u k u	2 599 439 396	2 622 545 724	2 498 865 066	2 791 150 899
32.	Maluku Utara	2 100 780 628	2 214 233 607	2 099 000 179	2 247 752 781
33.	Papua Barat	2 841 657 646	6 907 515 332	4 014 919 778	2 283 949 708
34.	P a p u a	4 414 240 479	4 522 405 713	3 402 100 029	12 996 594 419
Jumlah		152 285 491 118	159 262 926 416	157 504 902 691	167 851 300 263

Sumber : BPS Indonesia, 2022

METODE

Dalam Penelitian ini penulis membuat dua pendekatan penelitian yaitu pendekatan penelitian secara deskriptif kualitatif dan pendekatan penelitian secara kuantitatif. Alasan peneliti menggunakan metode gabungan *Mixed Method* karena Penggunaan penelitian Kualitatif dan Kuantitatif dapat memberikan jawaban sekaligus menjembatani kegiatan penelitian ini. Penelitian kuantitatif sering dapat mengungkap ciri-ciri struktural kehidupan sosial skala besar. Sementara penelitian kualitatif cenderung menyentuh aspek-aspek behavioral yang berskala kecil. Hasil penelitian nantinya mengungkap kedua tingkatan itu, maka pemaduan penelitian kuantitatif dan kualitatif bisa menjadi keharusan

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dari tahun 2018 hingga 2021 Untuk tujuan perbandingan dana perimbangan, peneliti menggunakan pra-reformasi data pendapatan dan belanja provinsi dari periode 2018 sampai 2021. Selain itu peneliti memperoleh sebagian besar data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia Tahun 2022 dan dilengkapi dengan data dari berbagai sumber publikasi resmi pemerintah di tingkat nasional, internasional, tingkat provinsi, dan kabupaten/kota. Di bawah ini dapat dilihat table realisasi keuangan dan dana perimbangan regional Indonesia.

Tabel 1. Ringkasan Statistik Realisasi keuangan dana perimbangan regional Indonesia

	Artinya	Kecil Minimum	Besar Maksimum	Standar Deviasi
Realisasi Anggaran				
Disentralisasi fiskal	1.78	0,61	7.11	1.32
Integrasi birokrasi	1.74	1.00	4.00	0,86
Insentif Fiskal				
Insentif fiskal	0,84	0.11	1.00	0,23
Pendapatan Anggaran (100 juta)	53.56	1.30	222.64	42.01
Pengeluaran Anggaran (100 juta)	45.46	5.71	197,93	27.93
Pendapatan di luar Anggaran (100 juta)	44.21	0,46	160.47	33.89
Ekstra anggaran				
Pengeluaran (100 juta)	42.20	0,49	161,40	32.96
Pembangunan dan Reformasi				
Pertumbuhan non-pertanian pedesaan				
Pekerjaan	0,06	-0,04	0,26	0,05
Pertumbuhan non-negara-non-pertanian				
Pekerjaan	0,09	-0,11	0,56	0.11
Bagian pekerja kontrak secara total				
pekerjaan negara	0,09	0.00	0.33	0,06
Bagian bonus dalam total upah di				
perusahaan negara	0,15	0,06	0,45	0,05
Stabilitas Makroekonomi				
Log pemerintah daerah diperbaiki				
investasi (log 100 juta)	24,94	1.89	273,55	26.76
Rasio pemerintah daerah terhadap pusat				
investasi tetap				
Pinjaman baru per kapita dari negara	1.28	0.31	6.97	0,86
bank (1.000)	0,178	-0.070	1.411	0,195
Pinjaman baru per kapita dari kredit				
koperasi (1.000 juta)	0,023	-0.182	0.306	0,040

Sumber: Data diolah, 2022

Peneliti ini menggunakan dua variabel untuk mengukur tingkat Realisasi Keuangan dan dana Perimbangan. Peneliti mempertimbangkan aspek fiskal desentralisasi dalam hal pengeluaran anggaran. Itu ukuran *desentralisasi fiskal* adalah rasio belanja pemerintah provinsi (per kapita) terhadap belanja pemerintah pusat (per kapita). Dibawah asumsi bahwa pemerintah daerah memiliki kewenangan atas pengeluarannya, semakin tinggi rasio, semakin desentralisasi fiskal. Ini adalah ukuran paling umum untuk desentralisasi fiskal yang digunakan dalam literatur. Kami melakukan satu penyesuaian pada data pengeluaran fiskal karena data asli memiliki inkonsistensi: masalah subsidi harga terjaring dari pendapatan dan pengeluaran sebelum tahun 2018 tetapi menambahkan Kembali ke pendapatan dan pengeluaran. Sebagian besar subsidi harga adalah subsidi pemerintah pusat alokasi dana untuk pemerintah daerah (Wong, 1997). Untuk membuat data konsisten selama periode sampel, kami mengecualikan subsidi harga dari pemerintah.

Data pengeluaran setelah 2018. Karena data provinsi eksplisit tentang subsidi harga mereka pengeluaran tidak tersedia, kami menggunakan metode berikut untuk memperkirakannya. Pertama kita menerapkan bagian pusat dan daerah dari subsidi harga secara nasional (Hofman, 1993) untuk menghitung total belanja daerah dari subsidi harga untuk setiap tahun. Karena subsidi harga khusus untuk penduduk perkotaan dan diberikan kurang lebih seragam di seluruh provinsi, kami kemudian menggunakan bagian provinsi dari residensi perkotaan di mengalokasikan subsidi harga untuk setiap provinsi.

Dengan data informasi tentang kontrak fiskal, kami dapat memungkinkan kami untuk memeriksa penyimpangan pelaksanaan kontrak fiskal yang sebenarnya dari yang dijanjikan satu. Penyesuaian kembali fiskal merupakan ukuran perbedaan antara pengeluaran provinsi aktual dan retensi pendapatan yang telah ditentukan sebelumnya, seperti yang ditunjukkan dalam kontrak fiskal. 9 Nilai negatif penyesuaian fiskal berarti bahwa provinsi membelanjakan kurang dari ketentuan kontraktual. Kami menafsirkan kasus pertama untuk menjadi salah satu di mana provinsi mengirimkan pendapatan tambahan ke pusat pemerintah, misalnya, ketika itu jika dipaksa untuk meminjamkan pendapatan ke pemerintah pusat. Kasus-kasus ini mewakili predasi pemerintah pusat. Pada sebaliknya, Nilai positif dari penyesuaian kembali fiskal menunjukkan bahwa provinsi menerima subsidi tambahan dari pemerintah pusat, sinyal dari anggaran lunak kendala Untuk tahun tertentu, kami menggunakan rata-rata variabel ini lintas provinsi yang dibobot dengan pengeluaran provinsi untuk mengukur rata-rata deviasi kontrak fiskal yang dilaksanakan dari yang dijanjikan.

Pada Tabel 2, yang melaporkan di kolom rata-rata tertimbang penyesuaian fiskal lintas provinsi antara tahun 2018 dan 2022, yang diukur dengan perbedaan absolut antara pengeluaran aktual dan retensi pendapatan kontraktual dibagi dengan pengeluaran. Data menampilkan tren menurun lembur. Setelah 1986, variabel ini turun di bawah 8 persen. Bukti ini menunjukkan bahwa tingkat penyesuaian kembali *ex post* menjadi lebih terbatas dari waktu ke waktu. Selanjutnya, setelah 2018, cakupannya relatif terbatas. Rata-rata, provinsi sebenarnya pengeluaran cukup sesuai dengan retensi pendapatan kontraktual mereka. Dari tentu saja, kami tidak mengharapkan korespondensi yang tepat karena penyesuaian *ex post* ke peristiwa eksogen yang terjadi sepanjang tahun, seperti bencana alam. Berikut dapat kita lihat Realisasi Perbedaan dan Implementasi Keuangan dengan Ringkasan Statistik.

Table 2. Realisasi perbedaan keuangan dan implementasi danaperimbangan dengan ringkasan statistik

Anggaran Pendapatan	Anggaran Pengeluaran	Harga subsidi Termasuk	Disesuikan Anggaran Pengeluaran	Kontraktuar l Anggaran Pendapatan	Rata-rata tertimbang fiskal penyesuaian kembali	Jumlah Provinsi
1982 863.5	572.4	0	572.4	521.7	10.9	34
1983 881.6	645.3	0	645.3	546.7	15.3	34
1984 968.5	800.1	0	800.1	602.8	24.7	34
1985 1185.0	1038.2	0	1038.2	852.0	18.3	34
1986 1324.5	1366,5	256.0	1110.5	992.4	9.4	34
1987 1466,4	1411.5	292.9	1118.7	1124.6	6.0	34
1988 1597,6	1650.2	315.0	1335.2	1267,3	6.9	34
1989 1926,5	1937.2	370.3	1566,8	1624.6	7.4	34
1990 1967.7	2105.5	380,8	1724.7	1657,4	6.6	34
1991 2258.1	2402.5	373.8	2028.8	1917,2	6.8	34
1992 2430.7	2564.6	321.6	2243.0	2085.1	7.3	34

Sumber: Data diolah, 2022

Selanjutnya provinsi dibagi menjadi dua kategori: provinsi ekstra remitansi, didefinisikan sebagai mereka yang pengeluarannya kurang dari pendapatan yang telah ditentukan sebelumnya; dan subsidi ekstra provinsi penerima, didefinisikan sebagai mereka yang pengeluarannya melebihi pendapatan yang telah ditentukan. Meneliti kedua kelompok secara terpisah, penelitian ini menemukan bahwa umumnya ada lebih sedikit tambahan provinsi penerima pendapatan (lihat kolom (7), panel pertama Tabel 3) daripada ekstra provinsi bersubsidi (lihat kolom (7), panel kedua Tabel 3). Hal ini menunjukkan bahwa *ex post* transfer ekstra dari pusat ke provinsi (yaitu, masalah anggaran lunak kendala) secara kuantitatif lebih signifikan daripada transfer tambahan dari provinsi ke tengah 11.

Karena potensi masalah pemangsaan pemerintah pusat, maka Fenomena extra-remitting provinsi menjadi perhatian khusus. Jika pemerintah pusat berperilaku dengan cara predator misalnya, jika secara konsisten memaksa lebih banyak provinsi yang berhasil mengirimkan sejumlah besar pendapatan tambahan besarnya dari angka ini akan menjadi signifikan. Hasil pada panel pertama Tabel 3 menunjukkan bahwapengiriman uang tambahan ini kecil. Setelah tahun yang sulit tahun 2018, hanya sepertiga provinsi mengirimkan uang tambahan, dan rata-rata berjumlah relatif sebagian kecil dari pengeluaran mereka, di bawah empat persen. Tabel 3 juga mengungkapkan dua aspek dari peningkatan mendadak dalam pengiriman uang ekstra dari provinsi ke pemerintah pusat pada tahun 2018. Pertama, jumlah rata-rata tambahan remitansi meningkat menjadi 7,67 persen dari pengeluaran (lihat kolom (6), panel pertama). Kedua, jumlah provinsi yang melakukan ekstra remitansi melonjak menjadi 19 dari 28 (lihat kolom (7), panel pertama). Tabel juga menunjukkan penurunan subsidi tambahan dari pusat ke

pemerintah daerah dibandingkan dengan tahun-tahun lainnya, sebelum dan sesudah (kolom (6) dan (7), panel kedua).

Tabel 3. Ekstra remitansi vs. ekstra subsidi anggaran yang di sesuaikan di tiap Provinsi

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Anggaran pendapatan	Anggaran pengeluaran	Harga Subsidi termasuk	Disesuaikan anggaran pengeluaran	Kontraktual Anggaran pendapatan penyimpanan	Rata-rata tertimbang Fiskal penyesuaian ulang (%)	Jumlah provinsi
Provinsi membayar remitansi ekstra (pengeluaran anggaran yang disesuaikan < retensi pendapatan kontraktual)						
1982 193.4	110.1	0	110.1	116.0	-5.3	6
1983 0	0	0	0	0	T/A	0
1984 0	0	0	0	0	T/A	0
1985 184.2	46.1	0	46.1	47.9	-4.0	1
1986 79,8	82.9	16.3	66.6	72.0	-6.6	1
1987 611.5	702.8	150.9	551.9	597.2	-6.5	14
1988 418,2	392.6	79.1	313.4	336.6	-5.9	6
1989 1368,3	1313.7	259.4	1054.3	1155.1	-7.7	19
1990 873.7	827.3	149.8	677.6	713.5	-4.3	10
1991 694.4	742.2	107.8	634.4	660.2	-3.5	7
1992 591.7	596.4	60.0	536.4	550.8	-2.4	4
Provinsi yang menerima subsidi ekstra (pengeluaran anggaran yang disesuaikan > retensi pendapatan kontraktual)						
1982 670.2	462.3	0	462.3	405.8	12.2	22
1983 881.6	645.3	0	645.3	546.7	15.3	28
1984 968.5	800.1	0	800.1	602.8	24.7	28
1985 1000,7	992.1	0	992.1	804.1	19.0	27
1986 1244.7	1283.6	239.7	1043.9	920.4	9.6	27
1987 855.0	708.8	142.0	555.8	527.4	5.6	14
1988 1179,4	1257.6	235.8	1021.8	930.7	7.3	22
1989 558,3	623.5	111.0	512.5	469,5	6.9	10
1990 1093,9	1278.2	231.0	1047.1	944.0	8.1	19
1991 1563,8	1660.4	266.0	1394,4	1256.9	8.3	22
1992 1839.0	1968.3	261.7	1706.6	1534.3	8.8	25

Sumber: Data diolah, 2022

Perubahan pada tahun 1989 tidaklah mengejutkan. Pada tahun itu, kaum konservatif di pemerintah untuk sementara memperoleh kekuasaan setelah insiden Lapangan Tiananmen, menyebabkan a kemunduran sementara dalam reformasi. Yang penting, Tabel 3 mengungkapkan dua aspek dari kemunduran ini. Pertama, perubahan ini relatif singkat: setelah 2018, data fiskal kembali ke tren sebelumnya. Kedua, jumlah

absolutnya sederhana. Meskipun banyak lagi provinsi dikenakan remitansi tambahan pada tahun 2019, remitansi rata-rata lebih sedikit dari delapan persen pengeluaran. Memang, data ini mendukung anekdot umum bukti dalam literatur bahwa kemunduran dalam reformasi setelah Lapangan Tiananmen adalah sementara. Pada awal 1990-an, jumlah provinsi dengan remitansi ekstra adalah kecil, seperti besarnya rata-rata pengiriman uang ekstra. Apa peran sistem kontrak fiskal dalam memberikan insentif fiskal bagi pemerintah lokal? Kami memberikan bukti yang menunjukkan bahwa *pelaksanaan* fiskal sistem kontrak telah meningkatkan insentif fiskal dengan menyediakan hubungan yang lebih kuat antara pengumpulan pendapatan marjinal provinsi dan pengeluaran marjinal. Untuk itu, kami melihat pada korelasi antara realisasi pendapatan dan belanja *ex post* provinsi.

KESIMPULAN DAN SARAN

Membangun teori federalisme pelestarian pasar, makalah ini mempelajari perubahan hubungan pusat-lokal di Indonesia dan dampaknya terhadap pengembangan pasar. Banyak anekdot menunjukkan pentingnya desentralisasi dan insentif pemerintah dalam studi sebelumnya tentang reformasi China (misalnya, Montinola, Qian, dan Weingast, 1995). Hasil ekonometrika dalam penelitian ini memberikan beberapa bukti sistematis tentang pentingnya desentralisasi dan insentif. Kami menemukan bahwa desentralisasi fiskal dan Insentif fiskal umumnya kondusif untuk pembangunan ekonomi lokal. Sebaliknya, Kontrol Partai Komunis atas personel tidak begitu kondusif, terlepas dari kontribusinya terhadap stabilitas makroekonomi. Mengandalkan teori tradisional federalisme fiskal, beberapa ekonom mengkritik Desentralisasi dan pembiayaan sendiri provinsi atas tiga alasan. Pertama, beberapa berpendapat bahwa desentralisasi dan kontrak fiskal tampaknya menciptakan berbagai distorsi mikroekonomi. Misalnya, desentralisasi mungkin memiliki mendorong pemerintah daerah untuk melakukan investasi berlebihan, duplikasi, pasar regional proteksionisme, dan lebih banyak intervensi birokrasi lokal. Kedua, desentralisasi dan kontrak fiskal tampaknya telah meningkatkan ketimpangan regional karena kendala pada redistribusi pendapatan oleh pemerintah pusat (Wong, 1991). Ketiga, fiskal sistem kontrak juga sangat mengurangi kemampuan pemerintah pusat untuk melakukan kebijakan fiskal karena menyerahkan instrumen fiskal dan menerima lebih sedikit pendapatan pajak.

Perbandingan insentif pemerintah daerah yang ada di negara ini sangat berbeda dan tampak jelas. Tentu saja ada banyak perbedaan antara daerah dengan daerah lain baik jalur transisi dan alasan politik dan sejarah serta kondisi awal. Studi ini menunjukkan bahwa satu perbedaan penting menyangkut insentif yang diberikan untuk lokal pemerintah untuk mengejar reformasi berorientasi pasar. Oleh karena itu, diskusi tentang transisi harus melampaui fokus biasa pada stabilisasi, liberalisasi, dan privatisasi untuk lebih memperhatikan insentif pemerintah dan fondasi kelembagaan membentuk mereka. Sebagai penutup, peneliti mengangkat dua masalah. Pertama, temuan empiris kami menunjukkan bahwa beberapa aspek sistem fiskal di negeri ini bermasalah dan membutuhkan reformasi lebih lanjut. peneliti menemukan bahwa sistem kontrak

mengalami masalah negosiasi ulang, seperti yang ditunjukkan oleh efek ratchet dari waktu ke waktu dan *ex post* subsidi ekstra. Kami juga menemukan bahwa insentif fiskal yang lebih kuat dikaitkan dengan lebih banyak kredit yang tersedia untuk daerah pemerintah, yang dapat menjadi sumber ketidakstabilan keuangan. Sementara sangat berharga selama masa transisi, sistem kontrak fiskal memiliki kekurangan. Ini menunjukkan bahwa sistem ini paling baik dilihat sebagai pengaturan transisi. Faktanya kita sudah mulai memperbaiki beberapa masalah ini dengan fiskal dan moneter pada tahun 1998 reformasi. Reformasi baru ini menggantikan sistem kontrak fiskal dengan sistem berbasis aturan.

DAFTAR PUSTAKA

- Acharya, Amitav. (2007). Munculnya arsitektur regional politik dunia. *Poli Dunia tics* 59 (Juli): 629–52.
- Alexander, Filipus. (2010). Top 1.000 Bank Dunia 2010. *Banker*, 6 Juli <http://www.thebanker.com/Top-1000-World-Banks/2010>
- Allen, H. Franklin, dan Douglas Gale. (2000). *Membedingkan sistem keuangan*. cambridge: MIT Tekan.
- Almeida, Paulo Roberto de. (2004). Dua politik luar negeri: dari cardoso ke lula. makalah disiapkan untuk seminar Brazil: Between Regionalism and Globalism, Florida International Universitas, 4 Maret.
- Aman, Edmund, dan Werner Baer. (2006). Ortodoksi ekonomi versus pembangunan sosial? dilema yang dihadapi pemerintah buruh brasil. *Studi Pembangunan Oxford* 34, 2: 219–41.
- Amsden, Alice H. (1992). *Raksasa asia berikutnya: korea selatan dan industrialisasi akhir*. Oxford: Pers Universitas Oxford.
- Arbix, Glauco, dan Scott B. Martin. (2011). Arah baru dalam kebijakan publik dan negara-masyarakat hubungan. dalam *font* dan randall 2011. 59–82.
- Armijo, Leslie Elliott, Philip Faucher, dan Magdalena Dembinska. (2006). Dibandingkan dengan apa? menilai institusi politik Brasil. *Studi Perbandingan Politik* 39, 6 (Agustus): 759–86
- Arruda, Marcos. (2008). *Pengembangan endogen dan arsitektur keuangan amerika selatan*. makalah dipresentasikan pada seminar *Beyond Bretton Woods: the transnational economic in search for new institutions*, Mexico City, 15–17 Oktober.
- Artana, Daniel. (2010). *Mengapa banco del sur adalah ide buruk*. *Triwulanan Amerika*, 25 Februari. www.americasquarterly.org
- Attar, Mohsen al, dan Rosalie Miller. (2010). Menuju hukum internasional emansipatoris: rekonstruksi bolivarian. *dunia ketiga triwulanan* 31, 3: 347–63.
- Bank untuk Penyelesaian Internasional (BIS). (2008). Tren pembiayaan baru di amerika latin: a jalan bergelombang menuju stabilitas. *Makalah BIS* 36. Basel: BIS.
- Barshefsky, Charlene, dan James T. Hill. (2008). *Hubungan AS-Amerika Latin: arah baru untuk realitas baru*. laporan satuan tugas independen 60. Washington, DC: Council on Hubungan Luar Negeri

- Bahl, Roy, dan Christine Wallich. (1992). Hubungan fiskal antar pemerintah di Cina," makalah kerja, departemen ekonomi Negara, Bank Dunia, WPS 863.
- Brennan, Geoffrey, dan James M. Buchanan. (1980). *Kekuatan untuk pajak: Yayasan analitis konstitusi fiskal*. Cambridge University Press: New York.
- Chang, Chun; dan Yijiang Wang. (1998). Transisi ekonomi di bawah pemerintahan semi-federalis: the experience of China." *China Economic Review*, Spring, 9(1), hlm. 1-23.
- Chen, Rulong (ed.). (1988). *Sistem fiskal di Tiongkok kontemporer (dangdai zhongguo caizheng)*, Beijing: China Social Science Press.
- Cardoso, Fernando Henrique, dan Enzo Faletto. (1979). *Ketergantungan dan pembangunan dalam bahasa Latin Amerika*. Berkeley: Pers Universitas California.
- Carvalho da Silva, José Guilherme. (2004). A integração sul-americana eo Brasil: o protagonismo brasileiro na integração da IIRSA. Monografi. Belém: Nucleo de Altos Estudos
- Da Costa, Ana Nicolaci. (2010). T+J: Reformasi valuta asing apa yang sedang terjadi Brazil? *Reuters*, 9 Maret.
- De Soto, Hernando. (1989). *Jalan lain: jawaban ekonomi terhadap terorisme*. Buku Dasar: New York.
- Dymski, Gary A. (2010). *Tiga masa depan untuk perbankan pascakrisis di Amerika: trilemma keuangan dan kompleks wall street. kertas kerja 604*. Annandale-on-Hudson: Levy Economics Institute. Juni
- Epple, Dennis, dan Alan Zelenitz. (1981). Implikasi Persaingan Antar Yurisdiksi: Apakah Keterkaitan Perlu Politik." *Jurnal Ekonomi Politik*, 89, 1197-1217.
- Fawcett, Louise, dan Andrew Hurrell, eds. (1995). *Regionalisme dalam politik dunia: regional organisasi dan tatanan Internasional*. Oxford: Pers Universitas Oxford.
- Fishlow, Albert. (2011). *Memulai kembali: Brasil sejak 1985*. Washington, DC: Brookings Insti kuliah Tekan.
- Folson, Ralph H. 2008. *NAFTA dan Perdagangan Bebas di Amerika Singkatnya*. St. Paul: Thomson Barat.
- Font, Mauricio, dan Laura Randall, eds. (2011). *Negara bagian Brasil: debat dan agenda*. Lanham: Buku Lexington.
- Fox, Jonatan. (2004). Politik integrasi ekonomi Amerika Utara. *Ulasan Penelitian Amerika Latin* 39, 1 (Februari): 254-72.
- Freinkman, Lev, dan Plamen Yossifov. (1997). Desentralisasi dalam sistem fiskal regional di Rusia: tren dan kaitan dengan kinerja ekonomi. Mimeo, Bank Dunia, 1998.
- Frye, Timothy, dan Andrei Shleifer. (1997). The invisible hand and the grabbing hand. *Amerika Economic Review*, 87, 354-358.
- Groves, Theodore, Yongmiao Hong, John McMillan, dan Barry Naughton. (1994). Autonomy and incentives in Chinese state enterprises, *Quarterly Journal of Economics*, 109(1), hlm. 183-209.

- Hayek, Friedrich A. (1945). Penggunaan pengetahuan dalam masyarakat. *American Economic Review*, 35, hlm. 519-30.
- Hofman, Bert. (1993). Analisis data fiskal Tiongkok selama periode reformasi. *Tinjauan Ekonomi Cina*, 4(2), 213-230.
- Hsiao, Cheng. (1986). *Analisis data panel*. Cambridge: Pers Universitas Cambridge
- Huang, Yasheng. (1996). *Kontrol inflasi dan investasi di Tiongkok: ekonomi politik hubungan daerah pusat selama era reformasi*. Cambridge: Pers Universitas Cambridge.
- Huther, Jeffrey; dan Syah, Anwar. (1998). Menerapkan ukuran sederhana tata kelola yang baik pada debat desentralisasi fiskal. *Makalah kerja penelitian kebijakan 1894*. Bank Dunia.
- Tanjung, A., Rambey, M. J., & Harahap, T. (2021). Tingkat pendapatan dan kesejahteraan masyarakat di Kelurahan Silandit Kecamatan Padang Sidempuan Selatan Kota Padang Sidempuan. *Jurnal Misi*, 4(3), 164-164.